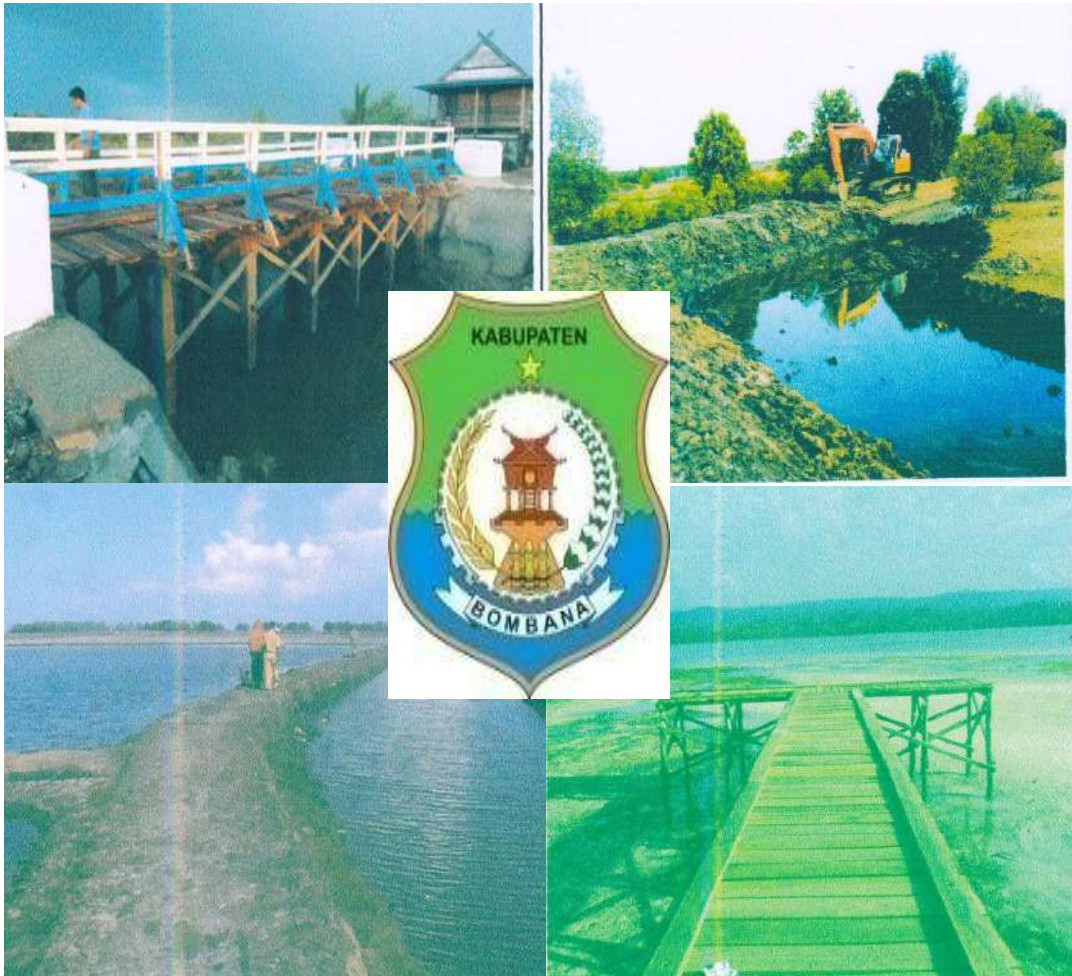


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)  
DINAS PERIKANAN  
TAHUN 2022**



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BOMBANA  
RUMBIA  
TA. 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2022.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja secara kuantitatif, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan menuju *good governance*, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan metode pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian



indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Kinerja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan tahun 2017-2022 sebagai kontrak kinerja.

Rumbia, Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BOMBANA,



**SARIF, SH**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19671231 199401 1 011



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan di sub sektor perikanan Kabupaten Bombana merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Bombana secara keseluruhan. Sub Sektor Perikanan berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bombana. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan perlu menyusun program-program yang lebih terarah dan lebih tajam yang efeknya secara signifikan langsung mengarah pada peningkatan PDRB Kabupaten Bombana.

Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2022, mencakup pengukuran pencapaian sasaran yang menggambarkan **kualitas capaian keluaran (output)** atau **hasil (outcome)** dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022.

Dari sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan Yaitu Perikanan budidaya, target 7.799 ton realisasi 7.634 ton, perikanan tangkap 36.272 ton realisasi 27.204 ton, Nilai produksi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan target Rp. 16.091.073.507 dengan realisasi Rp. 18.216.278.550.

Hambatan-hambatan yang masih dijumpai dalam pencapaian sasaran tahun 2022 pada dasarnya berasal dari faktor keterbatasan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap dan budidaya, terjadinya



perubahan musin serta pendanaan yang belum memadai, namun hambatan ini masih dapat diminimalisir dengan kontrol efektifitas dan efesiensi kerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana akan melakukan langkah-langkah atau strategi untuk meminimalisir kekurangan atau kelemahan yang ada, terutama Peningkatan Sarana dan Prasarana, baik sarana produksi perikanan maupun sarana operasional penunjang dan peningkatan sumberdaya manusia sebagai pioner pembangunan Perikanan.

Rumbia, Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BOMBANA,



**SARIF, SH**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19671231 199401 1 011



## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3 Sumber Daya OPD	15
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>18</b>
2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Perjanjian Kinerja	25
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>27</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.1.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja	32
3.1.2 Realisasi Kinerja Tahun 2020 s/d Akhir	32
3.1.3 Realisasi Kinerja Kabupaten Bombana dengan Target Nasional	33
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah di lakukan	36
3.2 Realisasi Anggaran	39
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>44</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai manatercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi; akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan dan



kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan susunan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 kepada Bupati Bombana, Dinas Perikanan Kab. Bombana menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

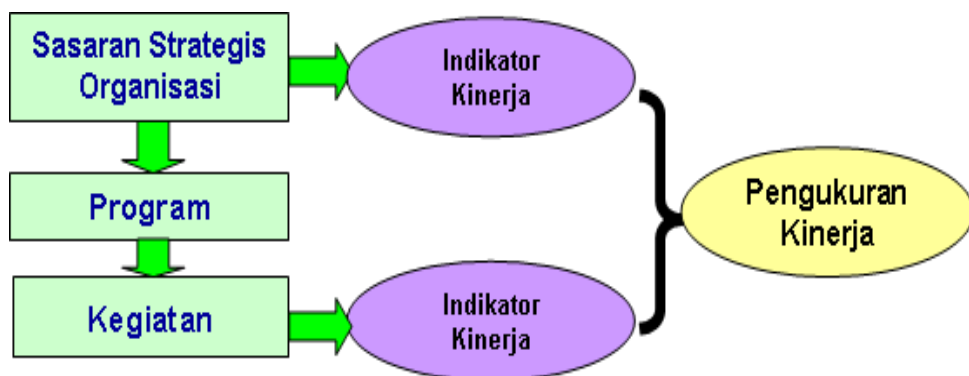
Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Perikanan Kabupaten Bombana untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bombana sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan Perbup nomor 68 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD P 2022.





Indikator kinerja Sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Indikator kinerja Sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja





## 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, dijelaskan bahwa Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2022 tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### *Tugas*

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan.

### *Fungsi*

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
5. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
6. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan SIUP di bidang perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam satu Kabupaten, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
7. pelaksanaan pengelolaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten, dan
8. melaksanakan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

### ***Kewenangan***

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut, Dinas Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfa spesifik lokasi, suaka perikanan, serta kawasan perlindungan budidaya;
2. Pelayanan izin usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut kewenangan kabupaten;
3. Peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang Kelautan dan Perikanan;



4. Pelayanan dan Pengelolaan tempat pelelangan ikan;
5. Penelitian dan pengkajian teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelayanan dan pengembangan sarana prasarana perikanan dalam kewenangan Kabupaten;
7. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
8. Pengaturan dan pengawasan penggunaan benih ikan dan sarana produksi perikanan; dan penggunaan air irigasi perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2022, yang terdiri atas :

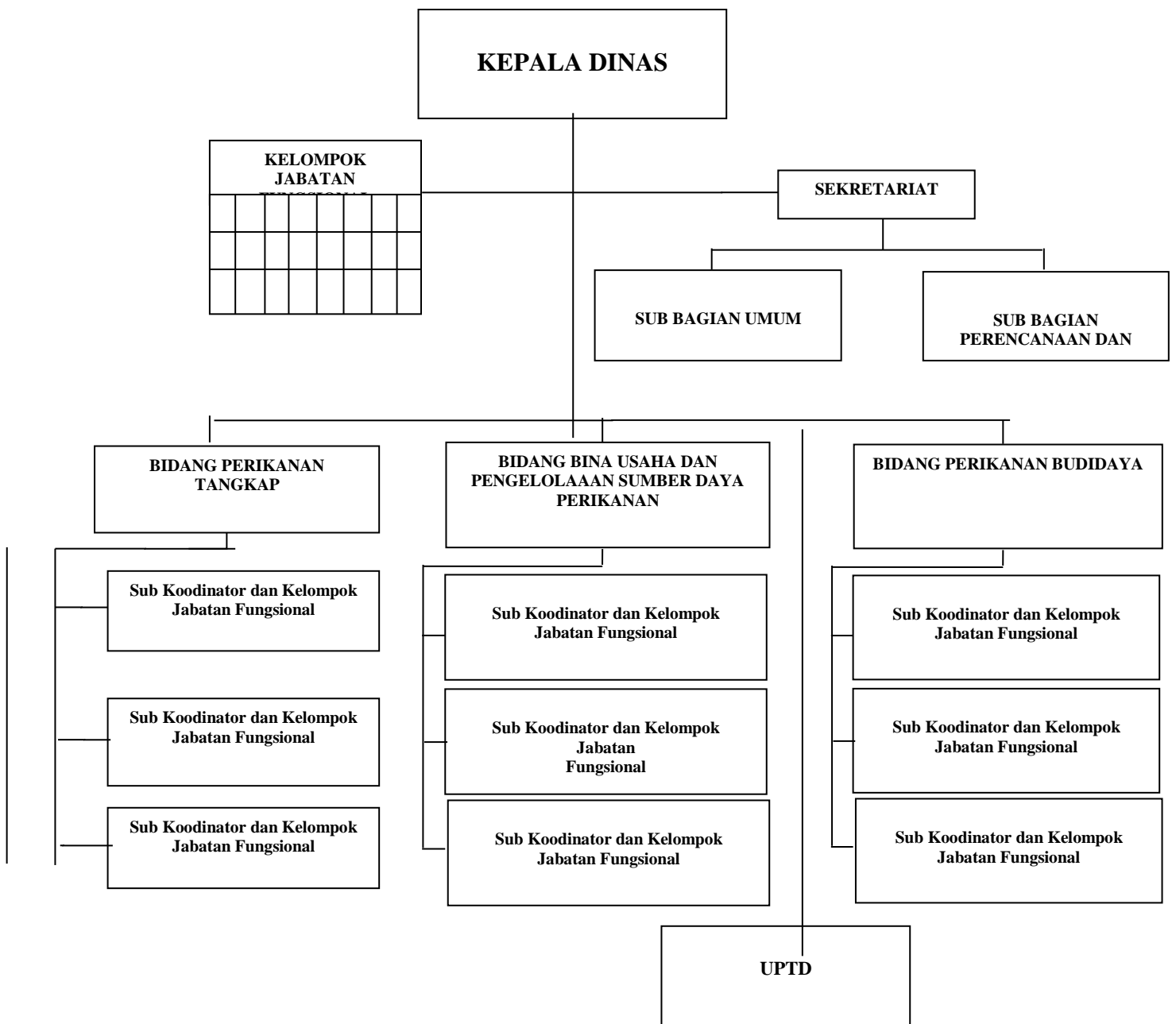
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perikanan Tangkap;
4. Bidang Perikanan Budidaya;
5. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
6. Sub Bagian Umum;
7. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan;
9. Kelompoik Jabatan Fungsional;



Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana seperti pada gambar berikut ini :

**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Bombana**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANANKABUPATEN BOMBANA  
 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 15 TAHUN 2022**





Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2022, diuraikan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

*Tugas dan Kewajiban* mempunyai tugas memimpin dinas dalam menyelenggarakan tugas di Bidang perikanan.

### 2. Sekretariat Dinas;

*Tugas pokok sekretariat* adalah Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerjak sekretariatan, dan Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Fungsi

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat | berdasarkan program kerja sekretaris serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. memeriksa pelayanan teknis administratif pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;



- f. melaksanakan penyusunan program dan pengelolaan statistik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- g. melaksanakan pelayanan teknis administratif pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas-tugas pada masing-masing sub bagian untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kerja masing-masing Kepala Bidang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- k. menganalisa dan menyediakan kebutuhan rumah tangga Kepala Dinas sesuai daftar kebutuhan serta pendistribusian untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. memeriksa konsep surat, nota dinas dan surat tugas usul kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, serta izin cuti pegawai sesuai prosedur untuk disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;



- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, dan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis:

**Sekretariat** terdiri atas :

- a. Sub Bagian umum;
- b. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan

### 3. **Bidang Perikanan Tangkap**

*Tugas dan Kewajiban* Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap, bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Fungsi**

- a. Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja Bidang Penyuluhan dan Perikanan Tangkap serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan tangkap;;
- c. Melaksanakan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. Memberikan penyuluhan dalam bentuk pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap;





- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- g. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi usaha penangkapan ikan;
- i. Melaksanakan penyusunan data dan informasi usaha perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
- k. Validasi dan verifikasi data kelompok penerima bantuan; dan
- l. Monitoring dan evaluasi;

#### 4. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

*Tugas dan Kewajiban* mempunyai tugas melaksanakan analisis pemasaran hasil perikanan untuk penguatan daya saing produk perikanan serta pengelolaan sumber daya perikanan. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Fungsi**

- a. Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- c. Melaksanakan evaluasi Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan,;



- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- f. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi bina usaha dan pemanfaatan potensi perikanan;
- h. Melaksanakan penyusunan data dan informasi Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis mau pun lisan;
- j. validasi dan verifikasi data kelompok penerima bantuan; dan
- k. Monitoring dan evaluasi.

5. **Bidang Perikanan Budidaya**

*Tugas dan Kewajiban* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan, Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Fungsi**

- a. Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja bidang perikanan budidaya serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi perikanan budidaya;
- c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan potensi perikanan budidaya,;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan perikanan budidaya;
- e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan pendidikan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- f. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pengawasan potensi perikanan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi pengelolaan pemanfaatan potensi perikanan;
- h. Melaksanakan penyusunan data dan informasi pengelolaan pemanfaatan potensi perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis mau pun lisan;
- j. Validasi dan verifikasi data kelompok penerima bantuan; dan
- k. Monitoring dan evaluasi.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah secara operasional di lapangan;
- b. Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;



- d. Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan runag lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing;
- c. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing | masing pengelompokan uraian fungsi;
- d. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksana dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- e. Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- f. Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.



### 1.3 Sumber Daya OPD

Kondisi sumberdaya manusia yang tersedia relatif cukup memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

Berikut rincian komposisi sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, yang terdiri dari :

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
	Golongan I	- Orang
	Golongan II	- Orang
	Golongan III	14 Orang
	Golongan IV	5 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>19 Orang</b>

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

	Pendidikan	Jumlah
	SD	- Orang
	SLTP/ sederajat	- Orang
	SLTA/ sederajat	- Orang
	Sarjana Muda/ Diploma I, II, dan III	- Orang
	Sarjana S1	14 Orang
	Magister (S2)	5 Orang
	Doktor (S3)	- Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>19 Orang</b>



Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana didukung oleh Pejabat Struktural dan Fungsional dengan rincian pada Tabel 1 :

**Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural dan Non-Struktural**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
	Eselon II	1 Orang
	Eselon III	4 Orang
	Eselon IV	2 Orang
	Non Eselon	3 Orang
	Fungsional	9 Orang

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik struktural maupun diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan penatausahaan program kegiatan dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menabahnya wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidangnya khususnya urusan pengelolaan keuangan.

Dinas Perikanan Kabupaten Bombana yang telah melaksanakan/mengikuti bimtek/diklat penjenjangan diikuti sebanyak 3 orang dengan rincian seperti dalam tabel 4 :



**Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan**

No	Nama Diklat	Jumlah Pegawai
1	Diklat PIM I	- Orang
2	Diklat PIM II	1 Orang
3	Diklat PIM III	1 Orang
4	Diklat PIM IV	1 Orang



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumberdaya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumberdaya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bombana yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2022.

Dinas Perikanan Kabupaten Bombana diharapkan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan dan strategis bersama pengukuran penilaian penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara khusus, dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

- a. Persaingan di pasar global, dimana beberapa produk perikanan dari negara lain memiliki daya saing yang sangat tinggi yang dikarenakan proses produksi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan





Indonesia.

- b. Persaingan di pasar dalam negeri, yaitu daerah-daerah lainnya di Indonesia yang memproduksi produk perikanan sejenis.
- c. Persyaratan kualitas/mutu produk perikanan seperti persyaratan label, kemasan, keamanan produk, *traceability*, *green/eco* label dan syarat kandungan BTP (bahan tambahan pangan) akan semakin ketat. Ini merupakan suatu tantangan ke depan agar industri perikanan dapat lebih meningkatkan mutu dan memperketat kontrol kualitas produk perikanan yang dihasilkan.
- d. Persaingan konsumsi protein hewani lain, seperti ayam, daging (sapi), dan telur.
- e. Pendapatan dan daya beli konsumen. Dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi makanan yang lebih sehat. Masyarakat cenderung untuk membeli bahan pangan dan hasil perikanan yang telah diolah dan dikemas dalam bentuk yang lebih mewah. Ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang usaha industri pengolahan hasil perikanan, misalnya pengembang inovasi produk siap saji, produk beku, produk kaleng, produk kering, dan value added seafood (fillet kakap, tuna loin steak).

- **Regulasi dan Kebijakan**

Berdasarkan potensi dan tantangan pengembangan kegiatan perikanan tersebut di atas, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut :

- a. Meningkatkan nilai tambah produk dengan pengadaan subsidi konversi lahan untuk pembuatan tambak/ budidaya udang;
- b. Meningkatkan aktivitas pengolahan rumput laut;
- c. Mengembangkan kawasan perikanan berbasis perikanan



- tangkap dan kawasan perikanan berbasis perikanan budidaya;
- d. Mengembangkan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat mengenai aktivitas penangkapan ikan;
  - e. Melakukan konversi areal bakau menjadi tambak udang sesuai persyaratan yang berlaku.

• **Konektivitas (infrastruktur)**

Pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa :

- a. Pembangunan balai benih ikan/hatchery untuk menghasilkan bibit unggul;
- b. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- c. Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- d. Peningkatan kapasitas pelabuhan;
- e. Akses jalan yang lebih baik dari lokasi perikanan menuju pelabuhan dan pusat perdagangan regional;
- f. Pembangunan fasilitas penyimpanan hasil laut, di tempat-tempat pelelangan maupun di pusat-pusat perdagangan;
- g. Peningkatan kapasitas infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi).

• **SDM dan IPTEK**

Untuk mencapai pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan yang berkelanjutan, diperlukan upaya-upaya :

- a. Penyediaan pendidikan kepada nelayan untuk memastikan penggunaan metode penangkapan yang lebih baik guna menjaga kelangsungan produksi perikanan;
- b. Peningkatan produktivitas penangkapan dan pengolahan melalui pelatihan dan penyuluhan, pengadaan modal, alih teknologi tepat guna;
- c. Perbaikan edukasi nelayan dan akses terhadap finansial;



- d. Penegakkan peraturan terkait kualitas/mutu produk perikanan secara lebih baik;
- e. Pemberian bantuan dana (subsidi) terutama bagi petani pemula budidaya udang;
- f. Peningkatan standar proses industri, terutama untuk produk ekspor sehingga dapat mencapai nilai yang optimal.

### **1). Kebijakan**

Pengembangan wilayah komoditas unggulan/sentra-sentra produksi dengan didukung sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang memadai serta memperhatikan potensi wilayah perikanan Tangkap dan budidaya, budaya, dan skala prioritas. Pengembangan sistem pembudidayaan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas. Peningkatan kelembagaan petani pembudidaya ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Pembukaan lahan-lahan baru serta pengoptimalan lahan yang sudah ada.



## **2). Program dan Kegiatan**

### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

### **d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

### **e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Saran dan prasarana Gedung Kantor Lainnya

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**h. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**i. Program Pengolahan Perikanan Tangkap**

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

**j. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan



**k. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2017-2022 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6  
Indikator Kinerja Utama SKPD

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran	Satuan
1.	Laju pertumbuhan PDRB Ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton
			Nilai Produksi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp
		Meningkatnya Kesadaran mengkonsumsi Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan PerKapita Per Tahun	Kg/Orang/Tahun
2.	Nilai Predikat Sakip Kabupaten Bombana	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perikanan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perikanan oleh Inspektorat	Predikat



Ketujuh Indikator tersebut diatas menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan di capai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bombana dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran perikanan dalam perekonomian daerah.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, ditetapkan Perjanjian Kinerja yang di sepakati antara Kepala Dinas Perikanan dengan Bupati Bombana Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 7  
Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perikanan dengan  
Bupati Bombana Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	7.799	Ton
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	36.272	Ton
		Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	16.091.073.507	Rp
2	Meningkatnya Kesadaran Mengkonsumsi Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan PerKapita per Tahun	57	Kg/Kapita/Thn
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perikanan Oleh Inspektorat	A	Predikat SAKIP oleh Inspektorat



PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.812.000	238.411.200	APBD
Administrasi keuangan perangkat daerah	1.959.046.543	2.013.826.442	APBD
Admintrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.400.000	32.400.000	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.100.000	51.100.000	APBD
Administrasi umum perangkat daerah	832.545.300	982.905.100	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	977.167.357	977.157.557	APBD
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Pemerintahan Daerah	130.800.000	135.850.000	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.795.000	194.795.000	APBD
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.978000.000	4.826.305.000	APBD
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.442.761.731	6.924.761.731	APBD
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	225.000.000	280.121.760	APBD
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN</b>	<b>15.058.428.131</b>	<b>16.657.633.790</b>	





## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2022 yaitu Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2022 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBD.

Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu Kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah perda, Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).



Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian



sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian terhadap sasaran, maka di gunakan skala ordinal sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JUMLAH NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	85 Sampai dengan 100	Sangat baik
2	70 s/d kurang dari 85	Baik
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup baik
4	Kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja adalah hasil pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.



Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>% Capaian</b>	<b>KET</b>
1	Nilai Predikat SAKIP Dinas Perikanan	Predikat	A	BB	72,76	Baik
2	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	21,63	28	129	Sangat baik
3	Produksi perikanan budidaya	Ton	7.799	7.634	98	Sangat baik
4	Produksi perikanan tangkap	Ton	36.272	28.139	78	Baik
5	Produksi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp	16.091.073.507	18.216.278.550	113	Sangat baik
6	Konsumsi Ikan PerKapita Per Tahun	Kg/Org/ Thn	57	60	105	Sangat baik

Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa hasil produksi perikanan (Budidaya dan P2HP ) pada Tahun 2022 mengalami Peningkatan, karena Adanya Perbaikan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (Rehabilitasi Tambak) dan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, sehingga Meningkatkan jumlah Produksi, dan terpenuhinya kebutuhan ikan di Pasar-pasar Lokal Kabupaten Bombana dan adanya upaya yang tinggi dari Pelaku UPI baik skala mikro usaha meningkatkan hasil produksi perikanan. Sedangkan



Perikanan tangkap menurun disebabkan terjadinya perubahan musim yang mengakibatkan produksi tangkap ikan menurun, Belum optimalnya Sarana dan Prasarana pendukung Perikanan Tangkap dan pangkalan pendaratan ikan serta kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain : Perlunya adanya penambahan sarana dan prasarana perikanan tangkap baik dalam bentuk bantuan langsung, berupa barang maupun dalam bentuk bantuan tidak langsung berupa jasa pendampingan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi nelayan untuk mendapatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang di butuhkan, - Perlu adanya pendampingan terhadap Pelaku usaha dalam upaya peningkatan strategi usahan yang di jalankan baik dalam hal permodalan, Saprass dan SDM, serta melakukan pendampingan Diversifikasi usaha nelayan untuk meningkatkan perekonomian nelayan.



### 3.1.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja, dibutuhkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan tahun 2022, seperti pada Tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Nilai Predikat SAKIP Dinas Perikanan	BB	BB	BB
2	Produksi perikanan budidaya	4.985	6.741	7.634
3	Produksi perikanan tangkap	18.738	27.204	28.139
4	Produksi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	302,329	344	530,10
5	Konsumsi Ikan PerKapita Per Tahun	54	57,07	60

Tabel 9. Realisasi Kinerja, Capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun terakhir

### 3.1.2 Realisasi Kinerja Tahun 2022 s/d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Nilai Predikat SAKIP Dinas Perikanan	A	BB	72,76
2	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	21,63	28	129
3	Produksi perikanan budidaya	7.799	7.634	98
4	Produksi perikanan tangkap	36.272	28.139	78
5	Produksi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	16.091.073.507	18.216.278.550	113
6	Konsumsi Ikan PerKapita Per Tahun	57	60	105

Tabel 10. Realisasi Kinerja Tahun 2022 s/d Akhir Periode RPJMD



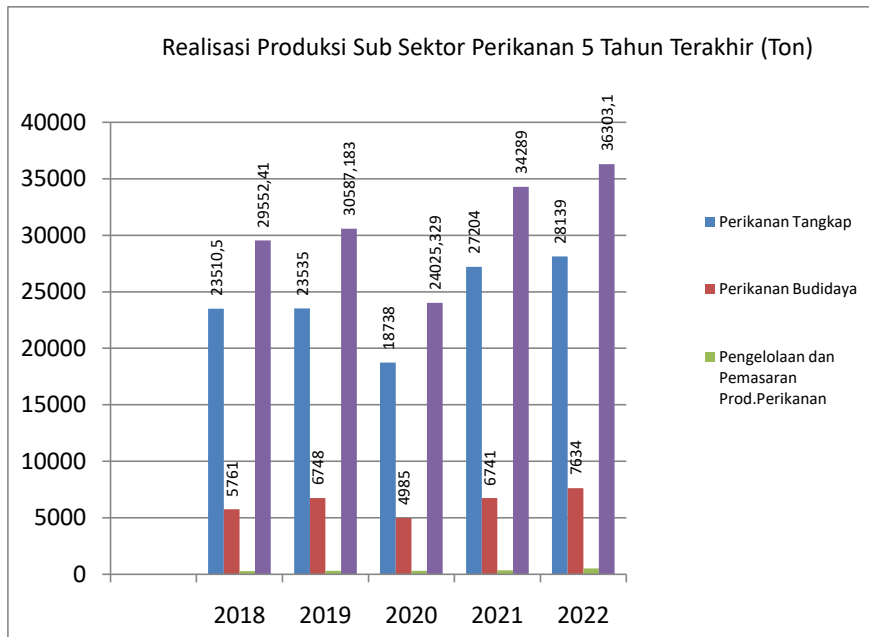
### 3.1.3 Realisasi Kinerja Kabupaten Bombana dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	
		Perikanan Bombana	Nasional
1	Nilai Predikat SAKIP Dinas Perikanan	BB	-
2	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	28	-
3	Produksi perikanan budidaya (Ton)	7.634	-
4	Produksi perikanan tangkap (Ton)	28.139	-
5	Nilai Produksi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (Rp)	18.216.278.550	-
6	Konsumsi Ikan PerKapita Per Tahun (Kg)	60	-

Tabel 11. Realisasi Kinerja Kabupaten Bombana dengan Target Nasional

Berdasarkan tabel di atas, meningkatnya produksi perikanan (Budidaya Dan P2HP) karena adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari para Stacholder (Pembudidaya, nelayan, pengolah hasil perikanan dan penyedia) yang terkait dalam mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

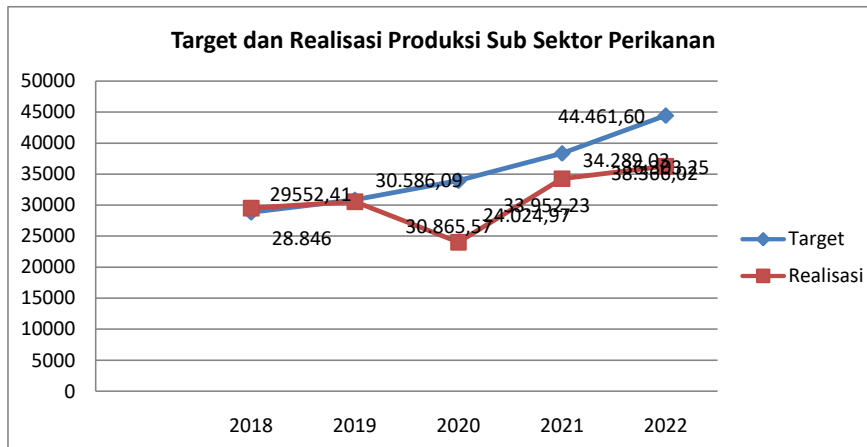
Produksi perikanan tangkap, budidaya, dan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada dan gambar berikut :



Gambar 2. Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (dalam satuan ton) selama periode 5 (lima) tahun terakhir

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Perikanan selama 5 tahun terakhir (tahun 2017 – 2022) secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 3. Capaian target dan realisasi Produksi Perikanan (Ton)  
Tahun 2018 – 2022

Indikator capaian kinerja sub sektor perikanan selama lima tahun terakhir, realisasi produksi perikanan pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu produksi perikanan budidaya 7.634 Ton (Rp. 247.191.000.000) atau), produksi perikanan tangkap 28.139 Ton (844.174.440), Nilai produksi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp. 18.216.278.550 atau 530,10 ton. Faktor yang menyebabkan peningkatan hasil produksi ikan tahun 2022 adalah adanya perbaikan sarana dan Prasarana Budidaya (Rehabilitasi Tambak, pemberian bibit ikan dan Rumput laut untuk meningkatkan jumlah produksi, dan Terpenuhinya kebutuhan ikan di pasar-pasar local Kab. Bombana dan adanya upaya yang tinggi dari pelaku UPI baik skala mikro dalam usaha meningkatkan hasil produksi olahan Perikanan, juga tercapainya kecukupan Gizi dan Protein hewani masyarakat dari hasil Perikanan, selain itu Adanya Komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang di targetkan sebelumnya,



### **3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah di lakukan**

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dinas perikanan yang tertuang dalam RENSTRA yaitu meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Dinas Perikanan Kab, Bombana.

Pencapaian tujuan dan sasaran ini didukung oleh adanya pendanaan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Perikanan Budidaya, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Program Pengembangan Statistik Penyuluh Perikanan, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sasaran Produksi Perikanan dan Program Pengembangan Data Dan Informasi Perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pada masing-masing program.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 238.411.200,-** terealisasi **Rp. 236.444.000** atau **99%**.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, berupa Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 2.013.826.442,-** terealisasi **Rp 1.944.176.125** atau **97%**.



Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, berupa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 32.400.000,-** terealisasikan **Rp.32.400.000** atau **100%**.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, berupa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 51.100.000,-** terealisasikan **Rp.51.099.000** atau **100%**.

Administrasi Umum Perangkat Daerah, berupa Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD, dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 982.905.100,-** terealisasikan **Rp. 979.640.929** atau **100%**.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Saran dan prasarana Gedung Kantor Lainnya, dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 977.157.557,-** terealisasikan **Rp. 942.772.000** atau **96%**.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 135.850.000,-** terealisasikan **Rp. 126.988.256** atau **93%**.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya



Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 194.795.000,-** terealisasi **Rp. 942.772.000** atau **96%**.

Program Pengolahan Perikanan Tangkap, berupa, Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genengan Air Lainnya yang Dapat diusahakan, Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah/Kabupaten, Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 4.826.305.000,-** terealisasi **Rp. 4.396.977.000** atau **91%**.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, berupa Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Lingkungan Budidaya dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 6.924.761.731,-** terealisasi **Rp. 6.922.573.705** atau **100%**.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, berupa Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Pemasaran Skala Mikro



dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengeolaan ikan, Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pagu anggaran **Rp. 280.121.760,-** terealisasi **Rp. 274.722.873** atau 98%.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menjawab setiap mandat yang diberikan kepada pengembang amanat. Sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh Karena itu Dinas Perikanan Kabupaten Bombana memilik kepentingan untuk menyampaikan Laporan Akun tabilitas Kinerja sebagai wujud langkah nyata dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bombana pada tahun 2022, sebesar Rp. 16.657.633.790-, yang direalisasikan sebesar Rp.16.093.878.736-, atau 97%. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Target dan realisasi APBD Dinas Perikanan Kabupaten Bombana disajikan dalam tabel 12.



**Tabel 12. Anggaran dan Realisasi APBD**

**Dinas Perikanan Kab. Bombana Tahun 2022**

Uraian		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.657.633.790,-</b>	<b>16.093.878.736,-</b>	<b>97</b>
1	Belanja Operasi	15.166.404.702,-	14.646.410.631,-	<b>97</b>
	1) Belanja Pegawai	2.019.326.442,-	1.949.771.125,-	97
	2) Belanja Barang dan Jasa	13.147.078.260,-	12.696.639.506,-	97
2	Belanja Modal	1.491.229.088,-	1.447.468.105,-	<b>97</b>
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	358.175.000,-	349.326.400,-	98
	2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	509.461.731,-	507.793.705,-	100
	3) Belanja Moda Gedung dan Bangunan	584.592.357,-	551.350.000,-	94
	4) Belanja Modal Aset tetap Lainnya	39.000.000,-	38.998.000,-	100
<b>C</b>	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>16.657.633.790,-</b>	<b>16.093.878.736,-</b>	<b>97</b>



No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran setelah perubahan (Rp)
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>238.411.200</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.338.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK-SKPD	18.975.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisaar Realisasi Kinerja SKPD	50.124.000
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	23.974.000
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.013.826.442</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.849.246.442
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.080.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.500.000
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>32.400.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000
4	<b>Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.100.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.500.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.600.000
5	<b>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>982.905.100</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.623.100
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	36.094.000
	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	814.188.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.000.000
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>977.157.557</b>
	Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.000.000



	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.533.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	584.592.357
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pengadaan Saprass BBU)	245.032.200
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>135.850.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	67.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.450.000
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>194.795.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	65.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.800.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.995.000
9	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>4.826.305.000</b>
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genengan Air Lainnya yang Dapat diusahakan]	4.751.305.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	150.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	4.601.305.000
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah/Kabupaten	75.000.000
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.000.000
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	45.000.000
10	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>6.924.761.731</b>
	<b>(#) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>6.924.761.731</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	346.500.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.503.261.731
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Lingkungan Budidaya	25.000.000





11	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>280.121.760</b>
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	20.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	235.121.760
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	235.121.760
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengeolaan ikan	25.000.000
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.657.633.790</b>



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana selama tahun anggaran 2022 .

Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana tahun 2022 mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan **kualitas capaian keluaran (output)** atau **hasil (outcome)** dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022. Capaian rata-rata kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2022 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pencapaian sasaran yang tidak mencapai target, antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Belum optimalnya Sarana dan Prasarana pendukung Perikanan Tangkap
- Terjadinya perubahan musim yang mengakibatkan produksi budidaya ikan menurun
- Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum cukup memadai



Selain hal-hal tersebut di atas beberapa permasalahan lain yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Masih terbatasnya dana yang di alokasikan untuk pembangunan Perikanan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia mutlak diperlukan untuk mendukung pengelolaan perikanan dimasa mendatang.
- Perlunya dukungan dari semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat .

Rumbia, Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BOMBANA



**SARIF, SH**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671231 199401 1 011

